Analisis Implementasi Regulasi Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*)

Analysis of Implementation of Regulation on Determination of the Status of Limited Protection of Terubuk Fish (*Tenualosa ilisha*)

Awaluddin M. Siregar¹⁾, Retna Astuti Kuswardani²⁾, Syahbudin Hasibuan³⁾

1) Program Studi Magister Agribisnis, Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

2,3) Magister Agribisnis, Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi, mengetahui implementasi serta mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 43/KEPMEN-KP/2016 terhadap ketersediaan sumber daya ikan terubuk dan pendapatan nelayan di Kabupaten Labuhanbatu. Pada penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma normatif interpretatif, teori yang ada dan digunakan dalam penelitian dikonstruksikan sebagai sebuah bangunan yang tidak sempurna, penelitian ini bersifat deskriptif. Dapat digambarkan bahwa Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) telah terlaksana dalam bentuk kegiatan sosialisasi, patrol laut dan monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian dan kelompok pengawas masyarakat. Efektivitas dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terhadap ketersediaan sumber daya ikan secara yuridis dan dilihat dari hasil tangkapan nelayan mengalami peningkatan dan cukup efektif, namun belum signifikan karena penindakan sanksi atas pelanggaran belum terwujud dan hambatan dan kendala dari implementasi Keputusan tersebut yaitu implementasi peraturan yang tidak tersosialisasi secara luas, tidak diringi dengan bantuan sarana dan prasarana terhadap nelayan sangat minim dan tidak sesuai dengan sosial budaya masyarakat yang lebih terikat pada kearifan lokal.

Kata Kunci: Implementasi, Keputusan, Ikan Terubuk

Abstract

*This study aims to determine the form of implementation, find out from the implementation and find out the obstacles and constraints in implementing the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number: 43 / KEPMEN-KP / 2016 on the availability of terubuk fish resources and fishermen income in Labuhanbatu Regency. In scientific research that uses qualitative approaches with interpretative normative paradigms, existing theories used in research are constructed as imperfect buildings, this research is descriptive in nature. It can be illustrated that the Implementation of the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number: 43 / KEPMEN-KP / 2016 concerning Limited Protection of Terubuk Fish (*Tenualosa ilisha*) has been carried out in the form of socialization, sea patrol and monitoring activities carried out by the Government, the Indonesian National Army, Police and community watch groups. The effectiveness of the implementation of the Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia on the availability of fish resources legally and seen from the catches of fishermen has increased and is quite effective, but not yet significant because the enforcement of sanctions for violations has not yet materialized and the obstacles and constraints of the implementation of the Decree are the implementation of regulations which is not widely socialized, is not accompanied by the assistance of facilities and infrastructure for fishermen is very minimal and not in accordance with the socio-cultural community that is more bound to local wisdom.*

Keywords: Implementation, Decision, Terubuk Fish

How to Cite: Siregar, A. M., R. A. Kuswardani & S. Hasibuan. (2020). Analisis Implementasi regulasi Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*). *Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis*, 2(1) 2020: 10-25,

Email : retnaastuti@uma.ac.id

ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut mencapai 80 % dari luas daratan. Wilayah perairan yang luas tersebut mempunyai kekayaan laut dan mengandung banyak sumber daya ikan yang potensial. Kekayaan laut tersebut tidak akan habis selamanya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia apabila dimanfaatkan dengan memperhatikan keberlanjutannya dan keadilan. Sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kenyataan sumber daya ikan belum mampu meningkatkan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berkembang isu bahwa penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan *illegal fishing* dan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan hidup akan mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi negara dan kepentingan nelayan sendiri. Keadaan tersebut memerlukan regulasi dan rekonstruksi alat tangkap yang ramah terhadap lingkungan hidup. Tujuan regulasi dan rekonstruksi alat tangkap ikan yang ramah lingkungan hidup, akan memberikan perlindungan terhadap sumber daya ikan. Alat tangkap ikan yang tidak ramah terhadap lingkungan hidup akan mengakibatkan terjadinya tangkap lebih (*overfishing*) dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut akan menyebabkan kerusakan habitat ikan sehingga kuantitas ikan akan mengalami penurunan dan bahkan bisa punah. Dampak kerusakan lingkungan hidup tersebut akan menimbulkan penderitaan generasi sekarang dan generasi yang akan datang karena tidak bisa mengkonsumsi ikan yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan tubuh manusia (Rochmani:2014)

Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 45 Tahun 2009 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan, selain untuk mengambil manfaat dari sumberdaya ikan secara ekonomis, adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya tersebut. Untuk itu, Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan antara lain untuk menetapkan potensi sediaan sumber daya ikan, alokasi sumber daya ikan, dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia(WPPNRI) yang dalam pelaksanaannya, Menteri mendapat rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor: 31/2004). Guna mengurangi dampak adanya kegiatan tangkap ikan lebih dan kerusakan habitat ikan perlu adanya penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan, maka lahirlah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) di wilayah perairan Sungai Barumun, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2016 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Dalam Permen tersebut telah diatur wilayah sebaran ikan terubuk sepanjang jalur ruaya pemijahan Ikan Terubuk di Daerah Aliran Sungai Barumun. Yang bertujuan untuk Pelestarian Ikan Terubuk tersebut dan agar kelestarian ikan terebuk tetap terjaga. Berdasarkan potensi dan permasalahan perikanan ikan terubuk yang ada, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis implementasi tentang penetapan status perlindungan terbatas ikan terubuk terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Keberlanjutan bukan merupakan akhir yang harus dicapai, tetapi target yang secara menerus harus dinegosiasikan. Keberlanjutan sumber daya ikan atau kemenerusan sumber daya ikan masih diragukan, mengingat terus berlangsungnya masalah lingkungan yang disebabkan oleh dampak negatif kegiatan manusia (Manitoba Round Table on Environment and Economic, 1992: 33). Dampak negatif kegiatan manusia harus dihentikan dengan penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya ikan dan rekonstruksi alat penangkap ikan yang ramah terhadap lingkungan hidup (Rochmani:2014). Eksploitasi ikan terubuk telah dilakukan secara intens dalam jangka waktu yang lama. Populasi ikan terubuk sangat berlimpah pada periode tahun 1960-an, mulai berkurang pada periode tahun 1970-an dan jauh berkurang pada tahun 1980-an yang direfleksikan oleh hasil tangkapan nelayan. Habitat ikan terubuk terutama disekitar Daerah Aliran Sungai barumun mengalami penurunan kualitas lingkungan yang sangat signifikan, terutama di sepanjang Sungai Barumun sebagai daerah peneluran dan pemijahan utama. Perpaduan antara tingkat eksploitasi yang tinggi dan penurunan kualitas habitat menyebabkan degradasi sumber daya ikan terubuk di wilayah perairan Labuhanbatu.

Untuk mengantisipasi terjadinya proses penurunan populasi yang menyebabkan kepunahan ikan terubuk di perairan Labuhanbatu, maka lahirlah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) di wilayah perairan Sungai Barumun, Kabupaten Labuhanbatu. Keputusan Menteri tersebut termasuk mengatur tentang pelarangan secara terbatas tersebut juga bersinggungan dengan waktu penangkapan yang dominan sehingga secara ekonomis juga berpengaruh secara signifikan pada ketersediaan sumber daya ikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah kualitatif, karakteristik utama dari pendekatan penelitian deskriptif kualitatif berparadigma normative interpretatif adalah bahwasanya metode ini dipilih untuk melihat apa realitas yang terjadi di balik fakta yang muncul ke permukaan dan teramati. Pada penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma normativ interpretatif, teori yang ada dan digunakan dalam penelitian dikonstruksikan sebagai sebuah bangunan yang tidak sempurna. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan bagaimana pelaksanaan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) dan pengaruh terhadap pendapatan nelayan serta hambatan dan kendala dari implementasi tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu, Kelompok nelayan yang di pesisir laut Labuhanbatu yaitu Kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir. Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Sampel sendiri memiliki arti

sebagai unit yang akan diteliti atau dianalisa. Populasi disini adalah seluruh pembudidaya kepiting yang ada di Kecamatan Panai Hulu, Tengah dan Hilir. Populasi nelayan dikonsentrasikan pada data kelompok nelayan.

Populasi kelompok nelayan 42 kelompok dan populasi nelayan yang tergabung dalam kelompok berjumlah: 1450. Sampel penelitian ini tentunya juga diambil dari sebagian data yang tergabung dalam kelompok nelayan yang berjumlah: 14, kelompok nelayan dengan jumlah nelayan sebanyak 127 orang. Jumlah populasi dan sampel penelitian ini tergambar dalam tabel di bawah ini.

Penelitian ini telah diawali dengan tahapan pra penelitian, penelitian dan pasca penelitian dengan waktu terhitung dari bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, berikut ini tabel jadwal dan waktu penelitian.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut, teknik pengumpulan data primer dan sekunder. adalah data yang diambil dan dikumpulkan dari sumber pertama dilapangan saat peneliti melakukan kegiatan langsung ke lokasi. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan metode dokumenter. Beberapa jenis dokumenter antara lain: kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, cerita roman atau cerita rakyat, data di *flashdisk* dan data tersimpan di website, dan lain-lain (Bungin, 2007:125).

Untuk mengelola data yang di dapatkan dari penelusuran kepustakaan, dan penelitian lapangan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif dimana metode analisa data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber baik sumber dari kepustakaan peraturan perundang-undangan, dan studi literatur lainnya, dan studi empiris yang menjadi objek penelitian. Pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian tesis ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi Kepmen KP No. 43 tahun 2016, diperlukan pengawasan dan monitoring yang berkesinambungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan Ikan Terubuk pada khususnya, dibutuhkan pendekatan yang persuasif serta peningkatan pengetahuan pentingnya sustainability terubuk di alam untuk generasi yang akan datang. Selain itu salah satu solusi untuk nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan Ikan Terubuk, dengan memberikan bantuan mata pencaharian alternatif, dimana BPSPL Padang sudah memberikan bantuan kepada 6 kelompok nelayan di Desa Teluk Sentosa, Desa Sei Merdeka dan Desa Telaga Suka, berupa jaring gulamah karena Ikan Gulamah tersedia sepanjang tahun di Sepanjang Sungai Barumun. Implementasi pemberlakuan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-

KP/2016 agar diketahui masyarakat nelayan, pemerintah mengambil langkah-langkah yaitu:

1. Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016

Pada bulan September 2017, Dinas Kelautan dan Perikanan Labuhanbatu melakukan Sosialisasi Perlindungan Kawasan Ikan Terubuk di 7 (tujuh) Desa, di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Panai Tengah (Desa Sei Rakyat, Desa Sei Merdeka, Desa Telaga Suka, Desa Selat Beting, dan Kelurahan Labuhan Bilik) dan Panai Hulu di Desa Teluk Sentosa dan Desa Meranti Paham (Zekia Helwani.2016).

Melalui kegiatan sosialisasi ini terkait dengan Kepmen KP No-43 Tahun 2016 tentang perlindungan terbatas ikan terubuk (*tenualosa ilisha*) diharapkan dapat memberikan waktu *spawning* ikan terubuk agar populasinya meningkat di alam. Laju penurunan populasi Ikan Terubuk dapat ditekan dengan pengawasan (*surveillance*) penangkapan dari habitatnya. Penyelamatan ikan Terubuk akan berhasil apabila semua pemangku kepentingan mentaati peraturan yang telah ditetapkan guna penyelamatan ikan Terubuk dari kepunahan di Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pada saat sosialisasi dilakukan permasalahan yang disampaikan adalah:

Nelayan meminta pengalihan mata pencaharian khusus nelayan terubuk berupa alat tangkap jaring gulama atau budidaya ikan (Jaring Gulama sudah diberikan BPSPL Padang Tahun 2016 kepada 6 kelompok sebanyak 27 set). Diperlukan sanksi kepada nelayan yang melanggar pada saat tanggal larangan sehingga semua nelayan mentaati peraturan karena apabila larangan tidak disertai sanksi akan berakhir sia-sia saja.

Nelayan resah karena pada bulan September ini nelayan dengan alat tangkap pukat tarek dua (seine net) yang beroperasi di muara maupun di perairan Kecamatan Sungai Berombang berhasil menangkap ikan terubuk dalam jumlah besar (berkisar 200-300 kg) karena ikan terubuk tertangkap di alat tangkap mereka dengan ukuran terubuk rata-rata 250 gr per ekor. Hal ini disebabkan tidak adanya pengawasan dari DKP Propinsi Sumatera Utara maupun PSDKP Satker Tanjung Balai terkait pengawasan alat tangkap yang dilarang di perairan Kabupaten Labuhanbatu.

Tidak adanya pelarangan ukuran mata jaring rata-rata nelayan menggunakan size 2,5 – 3 inchi. Sehingga penangkapan ikan terubuk dengan ukuran besar yang pada umumnya bertelur lebih banyak tertangkap pada masa larangan daripada ikan terubuk jantan (ukuran di bawah 25 cm).

Penangkap udang galah banyak yang menggunakan bahan kimia (potas)/tuba dan alat setrum sehingga tidak hanya udang galah/benur udang galah yang mati tetapi juga biodata lain yang ada di perairan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 mil merupakan wewenang daerah Propinsi. Sehubungan dengan hal tersebut penangkapan yang menggunakan bahan kimia (potas)/tuba dan alat setrum di perairan Sungai Berumun sangat sulit terjangkau/diawasi. Pengawasan alat tangkap yang dilarang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan oleh DKP Propinsi Sumatera Utara dan PSDKP secara kontiniu. Adanya pembuangan limbah pabrik sawit

yang berada di wilayah pesisir yang akhirnya bermuara di sungai Barumun diduga menyebabkan berkurangnya kualitas air di sungai barumun ini membutuhkan penelitian lebih lanjut karena secara autentik data tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan. Setiap Pabrik Kelapa Sawit mempunyai standart yang harus dipenuhi sehingga Badan Lingkungan Hidup lebih teliti dalam mengeluarkan izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Dinas Kelautan dan Perikanan menyarankan agar setiap nelayan terubuk mempunyai kelompok sehingga dapat diberi bantuan sebagai mata pencaharian alternatif sesuai kemampuan daerah. Pada tahun 2017 DKP Kabupaten Labuhanbatu mengalokasikan dana MPA nelayan terubuk sebanyak 25 Paket budidaya lele terpal untuk 5 kelompok nelayan. Dengan harapan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Utara, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara bersinergi membantu mata pencaharian alternatif nelayan terubuk sehingga tujuan akhir dari perlindungan ikan terubuk ini dapat terwujud (Zekia Helwani.2016).

Pada tahun 2016, Permen KP No. 43 telah ditetapkan yang isinya menyebutkan bahwa ikan terubuk jenis *Tenualosa ilisha* di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara adalah ikan yang perlindungannya terbatas, artinya ikan tersebut tidak dilarang penuh penangkapannya atau masih bisa dimanfaatkan di tanggal-tanggal tertentu pada bulan Januari s.d April. Namun dilarang pada saat peralihan bulan gelap ke terang dan terang ke gelap dari bulan Januari s.d April pada kalender Hijriah (48 hari selama 4 Bulan). Oleh karena itu segala sesuatu yang sudah dikeluarkan "Peraturannya" tentunya memiliki konsekuensi (sanksi).

Negara ini memiliki dasar hukum (*Rechtsstaat*) tertinggi yaitu UUD 1945 yang mengandung 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan setelah mengalami 4 kali perubahan (*Amandemen*). Oleh karena itu setiap peraturan perundangan yang berada di bawahnya wajib menjunjung tinggi UUD 1945. Dalam Ilmu Perundang-Undangan, ketentuan pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perumusan ketentuan pidana tersebut tergantung pada masing-masing peraturan perundang-undangan. Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang dapat mencantumkan ketentuan pidana hanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sehingga sanksi pidana atas pelanggaran yang dimuat dalam Permen KP. No. 43/2016 tidak diatur, tetapi pengaturan pidananya ada dalam undang-undang No. 31/2004 sebagaimana diubah undang-undang No. 45/2009. Sanksi penangkapan ikan terubuk di hari larangan dapat dilihat pada flowchart berikut ini :

Gambar 1. Flowchart

Nelayan terubuk di Kabupaten Labuhanbatu pada umumnya menggunakan kapal berukuran di bawah 1 GT sampai 2 GT, dengan mesin Robin (2 PK), mesin Donfeng dan Kubota (6 PK), sehingga dapat disimpulkan bahwa nelayan terubuk labuhanbatu merupakan **nelayan kecil**. Dari flowchart diatas dapat diketahui bahwa apabila melakukan penangkapan ikan terubuk (*Tenualosa ilisha*) oleh nelayan kecil (UU RI No. 31/2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45/2009) pada saat tanggal larangan di bulan Januari s.d April akan dikenakan denda sebanyak Seratus Juta Rupiah.

2. Pengawasan dan Monitoring Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016

Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) diwilayah perairan Kabupaten Labuhanbatu, di sepanjang jalur ruaya pemijahan Ikan Terubuk di Daerah Aliran Sungai Barumon sudah ditetapkan, yakni berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 43 KEPMEN-KP/2016 tahun 2016. Perlindungan terbatas tersebut berlaku pada priode waktu tertentu, yakni saat pemijahan selama enam hari saat peralihan bulan gelap ke bulan terang (tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 kalender hijriah) pada bulan Januari sampai dengan bulan April setiap tahunnya dan saat pemijahan selama enam hari saat peralihan bulan terang ke bulan gelap (tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 bulan hijriah) pada bulan Januari sampai dengan Bulan April setiap tahunnya.

Dalam implementasi Kepmen KP No. 43 tahun 2016, diperlukan pengawasan dan monitoring yang berkesinambungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan Ikan Terbuk pada khususnya, dibutuhkan pendekatan yang persuasif serta peningkatan pengetahuan pentingnya sustainability terubuk di alam untuk generasi yang akan datang. Selain itu salah satu solusi untuk nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan Ikan Terubuk, dengan

memberikan bantuan mata pencaharian alternatif, dimana BPSPL Padang sudah memberikan bantuan kepada 6 kelompok nelayan di Desa Teluk Sentosa, Desa Sei Merdeka dan Desa Telaga Suka, berupa jaring gulamah karena Ikan Gulamah tersedia sepanjang tahun di Sepanjang Sungai Barumun.

BPSPL Padang bersama DKP Labuhanbatu sudah melaksanakan Monitoring Implementasi Kepmen KP No. 43 tahun 2016 dan Monitoring Bantuan Matapencaharian Alternatif (MPA) pada 6 kelompok yang mendapatkan bantuan di hari larangan pada bulan Februari 2016. Dari hasil monitoring tersebut, dapat disimpulkan semua anggota kelompok yang menerima bantuan di tiga desa, yakni Desa Teluk Sentosa, Desa Sei Merdeka, dan Desa Telaga Suka berupa jaring insang gulamah sudah mengetahui akan hari larangan penangkapan ikan terubuk, namun mereka tidak patuh dengan alasan Ikan Terubuk memiliki harga jual yang lebih tinggi. Kemudian masih terbatasnya nelayan yang mendapatkan sosialisasi, hal ini terlihat dari nelayan yang bukan anggota kelompok mayoritas belum mengetahui hari larangan penangkapan Ikan Terubuk. Selain itu, belum ada pengawasan dari pihak yang terkait terhadap implementasi Kepmen 43 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk, baru sebatas sosialisasi oleh DKPP Kabupaten Labuhanbatu dan BPSPL Padang.

Dilatarbelakangi hasil monitoring bulan Februari di hari larangan, semua nelayan baik yang menerima bantuan maupun yang tidak menerima bantuan masih menangkap Ikan Terubuk di hari larangan, maka sidak bersama dari instansi terkait sangat dibutuhkan dan di waktu yang akan datang diharapkan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran nelayan akan arti penting perlindungan Ikan Terubuk.

Pelaksanaan Sidak Bersama Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk di Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan oleh dua orang staff satker Medan-BPSPL Padang, yakni Monika Br Pinem, S. Pi dan Rati Afrida Yanti, S. St.Pi, Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Sumberdaya Tangkap, DKP Provinsi Sumatera Utara, Bapak Pardamean Lubis dan dua orang staf, Kepala Bidang Pengembangan Usaha DKPP Labuhanbatu, Ibu Zekia Helwani dan 3 orang staff, Bapak Jefry Silalahi, PSDKP Belawan dan 3 orang anggota POKWASMAS dari Kecamatan Panai Hulu (1 orang) dan Panai Tengah (2 orang), pada tanggal 18 April 2017 di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumun di Desa Telaga Suka, Desa Sei Merdeka, dan Desa Teluk Sentosa. Selain itu bahan publikasi juga diberikan berupa banner perlindungan Ikan Terubuk di masing-masing Desa dan DKP Labuhanbatu (Pardamean. 2019)

Pada saat sidak di hari larangan, yakni 18 April 2017, jumlah nelayan yang menangkap Ikan Terubuk sudah jauh berkurang jika dibandingkan saat monitoring di Bulan Februari. Namun, masih saja ada nelayan yang didapati menangkap Ikan Terubuk. Tim Sidak bersama lintas instansi menggunakan kapal nelayan yang difasilitasi oleh DKP Labuhanbatu. Sidak dimulai dari DAS Barumun Desa Tanjung Sarang Elang, Desa Teluk Sentosa dan di akhiri DAS Barumun di sekitar Desa Sei Merdeka dan Desa Telaga Suka. Team menemukan 3 orang nelayan yang sedang mencoba menangkap Ikan Terubuk, hal ini dapat diketahui dari jenis jaring yang digunakan, yakni jaring terubuk. Tim menghampiri nelayan berkomunikasi persuasif. Semua nelayan yang menangkap Ikan

pada saat itu mengakui tidak mengetahui akan larangan penangkapan Ikan Terubuk dan mereka bukan anggota kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan MPA jaring gulamah. Tim sidak bersama juga mendapati nelayan yang sedang mencari ikan gulamah di tengah sungai (Pardamean.2019)

Menurut nelayan yang sedang menangkap Ikan Terubuk tersebut, saat ini jumlah Ikan Terubuk di Sungai Barumon sudah jauh berkurang. Oleh karena itu, banyak nelayan yang tidak mencari Ikan Terubuk saat ini. Selain itu, saat ini Ikan Terubuk memiliki harga yang jauh lebih rendah di dibandingkan Bulan Januari dan Februari karena di Bulan April permintaan sudah menurun. Permintaan meningkat di hari raya imlek, hari raya cap gomeh dan sembahyang pekong yang diperingati di bulan Januari dan Februari.

Teguran yang diberikan team sidak bersama disampaikan secara persuasif dan tegas dan team mencoba menyampaikan maksud larangan penangkapan untuk keberlanjutan Ikan Terubuk di masa kini dan akan datang dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Ikan Terubuk, yakni satu ekor yang berhasil di tangkap nelayan tidak disita, merupakan kesepakatan bersama team sidak karena memang sosialisasi secara intensif di semua desa yang terkena dampak Kepmen KP No. 43 tahun 2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk belum dilaksanakan (Pardamean.2019)

Monitoring pertama dilakukan pada tanggal 21-22 Februari 2017 (tanggal 24-25 hijriah/Jumadil Awal) oleh BPSLM Padang Satker Medan bersama DKPP Labuhanbatu. Pada saat monitoring, masih dijumpai nelayan terubuk yang menjaring ikan terubuk, termasuk kelompok yang telah memperoleh bantuan MPA jaring gulama. Bahkan berdasar wawancara kepada kelompok nelayan, menyatakan bahwa semua nelayan terubuk masih menangkap ikan terubuk walaupun mengetahui tanggal larangan, dengan alasan ikan terubuk memiliki harga jual yang lebih tinggi dan lebih mudah mendapatkannya di sungai pada saat tersebut.

Terkait bantuan MPA jaring gulama, pada saat monitoring ikan gulama sangat sulit ditemukan jika dibandingkan dengan ikan terubuk. Selain itu, harga terubuk yang lebih tinggi dibandingkan ikan gulama mendorong nelayan untuk tidak mencari ikan gulama. Namun saat tidak musim ikan terubuk jaring gulama sangat bermanfaat buat mereka.

Menindaklanjuti monitoring pertama diatas, dilakukan sidak pada tanggal larangan bulan terakhir, yaitu tanggal 18-19 April 2017 (tanggal 21-22 hijriah/Rajab). Sidak dilakukan bersama oleh BPSPL Padang Satker Medan, DKP Provinsi Sumatera Utara, DKPP Labuhanbatu, PSDKP Belawan dan POKWASMAS Kecamatan Panai Hulu dan Panai Tengah (Pardamean,2019).

Pada saat sidak, jumlah nelayan yang dijumpai sedang menangkap ikan terubuk jauh berkurang jika dibandingkan saat monitoring pertama bulan Februari. Nelayan yang dijumpai sedang menjaring ikan terubuk (dapat diketahui dari jenis jaring yang digunakan) mengakui tidak mengetahui akan tanggal larangan penangkapan ikan terubuk dan memang mereka bukan anggota kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan MPA jaring gulama. Saat sidak juga menjumpai nelayan yang sedang mencari ikan gulamah di tengah sungai.

Menurut nelayan yang sedang menangkap ikan terubuk, saat ini ikan terubuk di DAS Barumun sudah jauh berkurang, sehingga banyak nelayan yang tidak mencari ikan terubuk, selain saat monitoring harga ikan terubuk jauh lebih rendah di bandingkan bulan Januari dan Februari karena di bulan April permintaan sudah menurun. Permintaan ikan terubuk meningkat di hari raya imlek, hari raya cap gomeh dan sembahyang pekong yang diperingati di Bulan Januari dan Februari (Budi Ikhwan.2019).

Kepada nelayan yang kedapatan menangkap ikan terubuk diberikan teguran dan pemahaman tanggal dan bulan larangan menangkap ikan terubuk, serta ikan terubuk hasil tangkapan belum disita. Tim Sidak juga memberikan bahan sosialisasi berupa banner informasi/himbauan kepada kelompok nelayan dan pihak desa.

Kedepannya diperlukan sosialisasi lebih intensif dan menyeluruh ke nelayan sepanjang DAS Barumun, serta pengawasan/patroli rutin pada tanggal dan bulan larangan menangkap ikan terubuk, sehingga tidak menjadi alasan nelayan untuk tidak patuh dan dapat menimbulkan efek jera jika kemudian dilakukan penindakan (<http://bpsplpadang.kkp.go.id/monitoring-kepmen-no--43-kepmen-kp-2016>).

Kemudian, dalam kelembagaan kelautan dikenal dengan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) adalah sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sesuai dengan KEPMEN No. 58 Tahun 2001, Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Pembentukannya berawal dari inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam Pokmaswas, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/ petugas.

Salah satu peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan yaitu dalam hal pengawasan sumber daya ikan. Jika dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya ikan di Kabupaten Labuhanbatu yaitu pengawasan terhadap pengelolaan ikan terubuk. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya ikan untuk kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan berbagai kegiatan pada tahun 2016 yaitu melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas sumber daya ikan di Kabupaten Labuhanbatu. Salah satu bentuk peran serta masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu dalam pengawasan sumber daya ikan yaitu mengawasi serta melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Labuhanbatu dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/Kepmen-Kp/2016 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*).

3. Efektivitas dari implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 terhadap ketersediaan sumber daya ikan terubuk di Kabupaten Labuhanbatu

Efektifitas Regulasi

Sumberdaya perikanan merupakan jenis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), namun sumberdaya ikan tersebut mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan.

Suatu sistem pengelolaan melalui pengaturan yang memadai mutlak diperlukan, mengingat banyaknya sumberdaya yang harus dibudidayakan dengan sebaik-baiknya. Sumberdaya ikan sangat peka oleh keadaan alam sekitarnya, apabila dieksploitasi secara berlebihan (*over exploitation*) melebihi jumlah tangkapan yang diperkenankan (*maximum sustainable yield*) ataupun apabila sumberdaya itu tidak dapat dieksploitasi sama sekali, hal ini akan menimbulkan dampak biologis bagi eksistensi sumberdaya ikan tersebut (Rawaeni, 2017).

Selain itu, sebagai upaya menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya ikan terubuk, maka lahirlah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/Permen-Kp/2016 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*). Keputusan ini mengatur tentang:

Diktum Pertama: Menetapkan Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) di perairan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara sebagai jenis ikan yang dilindungi

Diktum Kedua: Perlindungan Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan status perlindungan terbatas, untuk periode waktu dan wilayah sebaran tertentu.

Diktum Ketiga: Perlindungan terbatas untuk periode waktu tertentu sebagaimana dimaksud diktum kedua yaitu:

Larangan penangkapan Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) saat pemijahan selama 6 (enam) hari saat peralihan bulan gelap ke bulan terang (tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 kalender hijriah) pada bulan Januari sampai dengan bulan April setiap tahunnya; dan

Larangan penangkapan Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) saat pemijahan selama 6 (enam) hari saat peralihan bulan terang ke bulan gelap (tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 bulan hijriah) pada bulan Januari sampai dengan bulan April setiap tahunnya.

Diktum Keempat: Perlindungan terbatas untuk wilayah sebaran tertentu sebagaimana dimaksud diktum kedua yaitu sepanjang jalur ruaya pemijahan ikan terubuk di daerah aliran sungai barumun dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Sehingga dengan lahirnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/Permen-Kp/2016 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) memuat larangan yang bersifat terbatas dan keputusan ini juga memuat ciri-ciri ikan terubuk yaitu Tubuh umumnya memanjang ramping (*streamline*), memiliki tapis insang (*gill raker*), badan polos (tidak ditemukan bintik hitam di sepanjang tubuhnya), sirip ekor panjang dan meruncing, panjang tubuh maksimum (*total length*) 72 cm, tubuh berwarna keperakan.

Pada dasarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2016 tidak melarang sama sekali para nelayan untuk melakukan penangkapan,

melainkan membuat pembatasan penangkapan yakni tidak diperbolehkan menangkap ikan terubuk yang sedang bertelur.

Mengenai Permen KP Nomor 43 Tahun 2016, nelayan di perairan labuhantu pada umumnya telah mengetahui adanya aturan tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan. Aturan ini awalnya di sosialisasikan ke pabrik atau perusahaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Labuhanbatu lalu dari pabrik memberitahukan kepada pengepul yang kemudian diteruskan kepada nelayan.

Para nelayan khawatir jika Permen KP Nomor: 43 Tahun 2016 langsung dipaksakan secara drastis bisa mempengaruhi tingkat penghidupan nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari usaha penangkapan terubuk, terlebih nelayan di perairan Kabupaten Labuhanbatu hanya menggunakan sarana dan prasarana seadanya.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu Soerjono Soekanto, 2008):

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sehingga berlakunya Keputusan Menteri ini sudah sepatutnya mempertimbangkan faktor lain seperti ketersediaan sarana yang memadai. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan pastinya melahirkan kebijakan pembatasan penangkapan terubuk, bukan tanpa sebab dan telah melalui proses riset dan keilmiahan.

Dalam penyusunan norma atau pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpegang pada asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), dimana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundangundangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya. Dalam artian, pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan manifestasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat berlaku secara efektif.

Efektivitas Sumber Daya Ikan

Ikan terubuk merupakan jenis sumber daya ikan yang dapat diperbaharui, apabila dimanfaatkan secara lestari maka dapat menjadi sumber pendapatan bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Ikan terubuk yang hidup di perairan Labuhanbatu adalah jenis ikan terubuk dengan nama latin (*Tenualosa ilisha*). Ikan Terubuk ini merupakan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, terutama telurnya. Dimana nilai jual telur ikan Terubuk dalam kondisi kering bisa mencapai Rp. 2.500.000,00/kg (Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Terubuk, 2016).

Pendapatan nelayan dengan data pendapatan per kelompok nelayan pada tahun 2015 berjumlah Rp. 950.000.000.- (Sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) sebelum ada Kepmen dan pendapatan kelompok nelayan pada tahun 2017 atau setelah pemberlakuan Kepmen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 mengalami kenaikan yaitu pendapatan dengan jumlah Rp. 980.000.000.- (Sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah), artinya mengalami kenaikan sebesar 3,15% (tiga koma lima belas persen). Data pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Pendapatan kelompok nelayan Hasil wawancara

No	Kecamatan	Kelompok Nelayan	Pendapatan	
			Sebelum Kepmen (Rp)	Setelah Kepmen (Rp)
1	Panai Hulu	Mandiri	77 juta	80 juta
		Sejahtera	112 juta	114 juta
		Sentosa	100 juta	104 juta
		Muara	93 juta	95 juta
		Merdeka	82 juta	84 juta
2	Panai Tengah	Pesisir	91 juta	94 juta
		Abadi	113 juta	117 juta
		Telaga	104 juta	106 juta
3	Panai Hilir	Suka Maju	97 juta	100 juta
		Pabolo	81 juta	86 juta
Jumlah			950 juta	980 juta

Sumber : Data dari berbagai Sumber/ wawancara

Dari data tabel tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi dari Kepmen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 dikategorikan cukup efektif terhadap pendapatan nelayan walaupun kenaikannya tidak signifikan, kenaikan tersebut adalah factor dari pemberlakuan Kepmen yang memuat larangan bagi nelayan untuk tidak menangkap ikan terubuk pada masa bertelur, sehingga masa bertelur tersebut dapat terjaga dengan baik dan membiarkan ikan terubuk berkembang biak, sehingga menambah jumlah populasi ikan terubuk tersebut, kemudian ikan terubuk dapat ditangkap oleh nelayan diluar musim bertelur.

Hambatan dan kendala pelaksanaan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 terhadap nelayan di Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam menerapkan penegakan hukum tentang perlindungan ikan terubuk, ada beberapa hambatan yang dialami oleh pemerintah maupun nelayan. Beberapa faktor yang menghambat diantaranya adalah:

1. Faktor hukum itu sendiri, dimana peraturan yang di terbitkan oleh kementerian kelautan dan perikanan yaitu Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2016, merupakan aturan yang banyak menimbulkan banyak pro dan kontra, karena dampak yang ditimbulkan menyangkut hidup masyarakat nelayan. Oleh karena itu, seharusnya

ada solusi yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia sebelum menetapkan peraturan tersebut.

2. Sarana prasarana, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam rangka penegakan hukum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat nelayan.
3. Sosial budaya, sebagian nelayan masih menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat tradisional, seperti nelayan di Kecamatan Panai Hulu, Tengah dan Hilir yang masih menggunakan jala dalam menangkap ikan terubuk, padahal jala tidak melakukan selektivitas dalam melakukan tangkapan.
4. Jangka Waktu, nelayan perlu diberi jangka waktu untuk beradaptasi dengan adanya aturan larangan penangkapan ikan terubuk ini sembari pemerintah terus berupaya memberikan sosialisasi dan pembinaan.

Hambatan dan kendala lainnya dalam implementasi tersebut salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat nelayan khususnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan yaitu dalam hal pengawasan sumber daya ikan kurang aktif. Padahal bila ada pro aktif masyarakat, maka pengendalian dan pemanfaatan sumber daya ikan untuk kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Kendala lain dapat dilihat pada kelembagaan kelautan dan perikanan, secara substansial yang didasarkan pada kualitas dari setiap elemen masih banyak dijumpai permasalahan mendasar. Walaupun pelarangan sudah disusun, tetapi permasalahan yang utama adalah pelarangan ini belum secara efektif dapat diterima oleh pemangku kepentingan utama yaitu nelayan. Dalam persepsi pengambilan keputusan, maka regulasi ini belum menjadi aturan yang digunakan oleh nelayan (*rules-in-use*) (Rudd 2004), masih dalam bentuk *rules-in-formed*. Dalam tinjauan proses pengambilan keputusan, adanya deviasi antara *rules-in-use* dengan *rules-in-formed* merefleksikan belum sempurnanya keterwakilan nelayan dalam penyusunan aturan baik dalam tingkat *collective choice* maupun *operational choice*. Namun persoalan ini juga dapat timbul dari sisi implementasi, misalnya karena kurangnya sosialisasi pada nelayan. Hal ini terkait dengan siapa yang harus melakukan kegiatan sosialisasi ini.

Kelembagaan pengelolaan suaka perikanan ikan terubuk yang kuat, memerlukan adanya pilar kelembagaan. Pilar kelembagaan ini mencakup dukungang pada sisi peraturan, norma, maupun pengetahuan (Scott 1992 in Jentoft 2004) maupun regulatif, normatif, maupun kognitif (Jentoft 2004). Secara mendasar bahwa kelembagaan pengelolaan suaka perikanan ikan terubuk memerlukan adanya regulasi yang baik dan kuat. Namun demikian efektivitas regulasi akan meningkat, ketika substansi regulasi menjadi norma atau sesuai dengan norma masyarakat nelayan setempat. Pelanggaran atas larangan menangkap ikan yang sudah menjadi peraturan (legal) juga perlu didorong menjadi norma masyarakat (Lam & Pauly 2010), sehingga secara etika dan nilai masyarakat penangkapan pada waktu dan lokasi yang dilarang adalah tindakan yang salah dan mempunyai sanksi dari masyarakat. Namun demikian, pelanggaran atas larangan penangkapan juga bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat atas pelarangan tersebut. Karenanya aspek pengetahuan atau kognitif menjadi salah satu

pilar penting bagi kelembagaan yang akan dibangun. Untuk itu diperlukan usaha-usaha melakukan edukasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan secara efektif.

Bila ditelaah, kelembagaan kearifan lokal dulu telah mempunyai pilar yang kuat. Aturan (legal) pada waktu tersebut secara efektif berjalan karena adanya penegakan yang kuat, yang direfleksikan dalam bentuk sanksi. Namun demikian, secara lebih mendalam, aturan ini telah menjadi norma bagi nelayan setempat. Bila melanggar, disamping mendapatkan hukuman yang bersifat legal dan *tangible*, tetapi juga pengasingan atau pengucilan dari masyarakat. Hal ini menjadi faktor yang sangat kuat mendukung kelembagaan tersebut secara efektif. Efektivitas ini juga ditun-jang oleh kepercayaan adanya karma atau hukuman *non-tangible* atas pelanggaran ini seperti terkena celaka, sial atau hal lain yang sangat merugikan bagi pelanggar. Secara kognitif dan pengetahuan, pelarangan ini merupakan hasil rumusan pengetahuan mereka pada dinamika sumber daya yang telah dipelajari dan diajarkan secara turun temurun. Namun demikian, kearifan kelembagaan lokal seperti ini justru menghilang pada masyarakat tradisi di Indonesia dan Asia Tenggara diantaranya faktor restrukturisasi kelembagaan jaman kolonial, modernisasi teknologi atau meningkatnya kesadaran akan negara (Pomeroy 1995).

SIMPULAN

Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) telah terlaksana dalam bentuk kegiatan sosialisasi, patrol laut dan monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian dan kelompok pengawas masyarakat. Efektivitas dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) terhadap ketersediaan sumber daya ikan secara yuridis dan dilihat dari hasil tangkapan nelayan mengalami peningkatan dan cukup efektif dan peningkatan hasil tangkap ini terlihat setelah pemberlakuan Kepmen Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016, sehingga peningkatan hasil tangkap nelayan jelas memiliki korelasi dengan implementasi dari pemberlakuan dari Kepmen Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tersebut.

Hambatan dan kendala dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) menemui kendala yaitu implementasi peraturan yang tidak tersosialisasi secara luas, tidak diringi dengan bantuan sarana dan prasarana terhadap nelayan sangat minim dan tidak sesuai dengan sosial budaya masyarakat yang lebih terikat pada kearifan lokal.

Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) sebaiknya dilaksanakan secara luas dan berkelanjutan. Untuk mencapai efektivitas dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) terhadap ketersediaan sumber daya sebaiknya dibarengi dengan

bantuan sarana dan prasarana nelayan dan pola implementasinya disesuaikan dengan kearifan local masyarakat nelayan.

Kelompok nelayan sejatinya mendukung sepenuhnya Kepmen Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016, sebab dengan pemberlakuan dari Kepmen tersebut, hasil tangkap nelayan mengalami peningkatan walaupun belum signifikan. Untuk meminimalisir hambatan dan kendala dari implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 43/KEPMEN-KP/2016 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) sejatinya diperlukan adanya kegiatan evaluasi dan didiskusikan bersama stakeholder, terkait dengan hal itu, dibutuhkannya pengoptimalisasian kelembagaan yang terarah dan tepat sasaran agar berhasil guna bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali nelayan di Kabupaten Labuhanbatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin S. (2004) *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Ayodhyoa, A.U. (1983) *Metode Penangkapan Ikan Cetakan pertama Faperika*. IPB. Bogor
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuanbatu. (2017). Labuhanbatu Dalam Angka Rantauprapat.
- Blaber S.J.M., Brewer D.T., Milton D.A., Merta G.S., Efizon D., Fry G. & van der Velde T. (1999) The life history of the protandrous tropical shad *Tenualosa macrura* (Alosinae: Clupeidae): fishery implications. *Estuarine Coastal and Shelf Science* 49, 689–701
- Brewer, D. T., (2001), Ingestion of particulate woody material by Indonesian Terubuk-*Tenualosa macrura*. Proceedings of the International Terubok Conferences Sarawak, Malaysia. p 152- 167.
- Burhan Bungin. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta:PT. Rajagrafindo.
- Charles, AT. (2001). *Sustainable fishery systems*. Canada: Blakwell Science Ltd, 370 p.
- Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu., dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. (2013). Laporan Akhir Identifikasi Spesies dan Lokasi Pemijahan Ikan Terubuk di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, Pekanbaru.
- Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Terubuk. (2016). Editor : Andi Rusandi
- Direktur Jendral Perikanan Tangkap. (2002). *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2000*. Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta.
- Edrus, I.N., Suprpto., Panggabean, A.S., & Mardijah, S. (2012). *Tinjauan Aspek Penggunaan Bubu Laut Dalam dan Rawai Dasar Serta Aspek Sosial Ekonomi Lainnya*. Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Jakarta.
- Efizon, Drucker. (2001). *Community management initiatives for the Terubuk Fishery of Riau Provinces, Indonesia*. Proceedings of the International Terubok Conferences Sarawak, Malaysia. p 206- 207.
- FAO. (1995). *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. FAO Fisheri Department, 24p.
- Gatot dalam Marlina & Faisal Riza. (2013). *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Hermawan, M. (2006). Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil (Kasus perikanan pantai di Serang dan Tegal, Sekolah Pasca Sarjana IPB, Disertasi, Tidak diterbitkan.
- Irianto, H.E., & Murdinah. (2006). *Keamanan Pangan Produk Perikanan Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional PATPI, Yogyakarta, 2-3 Agustus 2006, hal 116–126.
- Marhaeni Ria Siombo. (2010). *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mulyadi S. (2007). *Ekonomi Kelautan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munawaroh, I. (2007). Urgensi Penelitian Dan Pengembangan. *Disajikan dalam studi ilmiah UKM Penelitian UNY*.
- Nurani, T.W. (2002). *Aspek Teknis dan Ekonomi Pemanfaatan Lobster di Pangandaran Jawa Barat*. Bulletin PSP, Vol. XI No.2, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Rasdani, M. (2005). Usaha Perikanan Tangkap yang Bertanggung Jawab. Makalah disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Ikan tanggal 14 – 24 Juni 2005, BPPI Semarang.
- Romimohtarto, K., Juwana, S. (2007). *Biologi Laut*. Penerbit Djambatan, Jakarta.